

**ANALISIS PENGARUH AUDITOR
PEMERINTAH TERHADAP TINGKAT KORUPSI
DI INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

CHRISTINA FARINDENA

NIM. 12030112140184

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2016

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Christina Farindena A N
Nomor Induk Mahasiswa : 12030112140184
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi
Judul Usulan Penelitian Skripsi: **ANALISIS PENGARUH AUDITOR
PEMERINTAH TERHADAP TINGKAT
KORUPSI DI INDONESIA**
Dosen Pembimbing : Herry Laksito, S.E., M.Adv. Acc., Akt

Semarang, 2 Juni 2016

Dosen Pembimbing,

(Herry Laksito, S.E., M.Adv. Acc., Akt)

NIP. 196905061999031002

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Christina Farindena AN
Nomor Induk Mahasiswa : 12030112140184
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH AUDITOR
PEMERINTAH TERHADAP
TINGKAT KORUPSI DI
INDONESIA**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 19 Juli 2016

Tim Penguji

1. Herry Laksito, S.E., M.Adv. Acc., Akt (.....)
2. Drs. Sudarno, M.Si., Akt., Ph.D. (.....)
3. Adityawarman, S.E., M.Acc., Ak. (.....)

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Christina Farindena, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Analisis Pengaruh Auditor Pemerintah terhadap Pengendalian Tingkat Korupsi di Indonesia, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 2 Juni 2016
Yang Membuat Pemyataan,

Christina Farindena
NIM. 12030112140184

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh temuan auditor pemerintah terhadap pengendalian korupsi dan pengaruh tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi auditor pemerintah terhadap pengendalian korupsi. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat korupsi sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah temuan auditor pemerintah dan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi auditor pemerintah. Untuk memperkuat hasil penelitian digunakan variabel kontrol yaitu pertumbuhan ekonomi, keterbukaan, ukuran pemerintah, pendidikan, dan gaji.

Populasi penelitian ini meliputi seluruh provinsi di Indonesia tahun 2011 hingga 2014, data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui laporan tahunan Kejaksaan, IHPS BPK RI dan Buku Statistik Tahunan Indonesia. Alat Statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda.

Pengujian statistik menyimpulkan bahwa temuan auditor pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap korupsi, sedangkan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi auditor berpengaruh signifikan dan positif terhadap korupsi. Selain itu pengujian variabel kontrol menemukan bahwa gaji berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat korupsi.

Kata kunci : auditor pemerintah, tingkat korupsi, temuan audit, dan tindak lanjut audit

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the effect of irregularities detected by government auditor on corruption control and the rectification effort based on government auditor's recommendation about corruption control. The dependent variable that used in this research is corruption and the independent variables are irregularities detected by government auditor and rectification effort. To strengthen the result of this research, few control variables are used, they are economic growth, open, government size, education, and wage.

The population of this research include all of the Indonesia's provinces. The data that used are secondary data from the attorney general's annual report, IHPS BPK RI, and Statistical Yearbook of Indonesian. Statistic tool that used in this research is multiple linear regression.

Statistical testing conclude that irregularities detected by government auditor doesn't have significant impact on corruption, meanwhile rectification effort based on government auditor's recommendation have significant and positive impact on corruption. Statistical testing to variable control conclude that wage have significant and negative impact on degree of corruption.

Keyword : government auditor, corruption, irregularities, and rectification effort

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan berkatNya sehingga skripsi dengan judul “Pengaruh Auditor Pemerintah terhadap Pengendalian Korupsi di Indonesia” ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Ekonomi pada Universitas Diponegoro. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini terdapat kekurangan dan tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari beberapa pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Suharnomo, SE., MSi selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Fuad S.E.T, M.Si., Akt., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Bapak Herry Laksito, S.E., M.Adv. Acc., Akt selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak H. Tarmizi Achmad, MBA., PH.d. selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan saran kepada penulis selama perkuliahan.
5. Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan.

6. Keluarga penulis Bapak dan Ibu yang selalu memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Tante Wien dan kakek, terima kasih banyak atas doa dan dukungannya.
8. Partner terbaik, Yulius RAT, terima kasih atas dukungan dan doanya.
9. Sahabat seperjuangan, Kleniks: Adhista, Yohan, Ifa, Rima, Yema, Puspa, dan Gina. Terimakasih atas suka duka dan sharingnya selama ini.
10. Teman-teman KKN Desa Gentingsari: Caca, Oci, Syaffa, Adri, Mas Arif, dan Mas Annas. Terimakasih atas bantuan dan doa-doanya.
11. Sahabat, teman, saudara, dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih membutuhkan perbaikan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak.

Semarang, 2 Juni 2016

Penulis,

(Christina Farindena)

NIM. 12030112140184

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR GRAFIK.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1

1.2. Pertanyaan Penelitian.....	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.4.1 Manfaat bagi Akademis.....	11
1.4.2 Manfaat bagi Penulis.....	11
1.4.3 Manfaat bagi Auditor.....	11
1.5. Sistematika Penulisan	11
BAB II TELAAH PUSTAKA	13
2.1. Landasan Teori.....	13
2.1.1. Teori Keagenan.....	13
2.1.2. Teori <i>Good Corporate Governance</i>	15
2.1.3. Auditor Pemerintah.....	16
2.1.4. Korupsi	18
2.1.4.1. Pengertian Korupsi.....	18
2.1.4.2. Penyebab Korupsi.....	22
2.1.4.3. Korupsi di Indonesia.....	23
2.2. Penelitian Terdahulu.....	24

2.3. Kerangka Pemikiran	28
2.4 Pengembangan Variabel.....	30
2.4.1. Jumlah Temuan Audit Pemerintah dan Tingkat Korupsi.....	30
2.4.2. Tindak Lanjut Perbaikan Pasca Audit dan Tingkat Korupsi.....	31
2.4.3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Temuan, Hasil Pemeriksaan, dan Tingkat Korupsi.....	33
2.4.3.1. Pertumbuhan Ekonomi.....	33
2.4.3.2. Keterbukaan.....	34
2.4.3.3. Ukuran Pemerintah.....	35
2.4.3.4. Pendidikan.....	35
2.4.3.5. Gaji.....	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	38
3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	38
3.1.1. Variabel Dependen	38
3.1.2. Variabel Independen	38
3.1.2.1. Jumlah Temuan Audit.....	39
3.1.2.2. Perbaikan Pasca Audit.....	39

3.1.3. Variabel Kontrol.....	40
3.1.3.1. Pertumbuhan Ekonomi.....	40
3.1.3.2. Keterbukaan.....	41
3.1.3.3. Ukuran Pemerintah.....	41
3.1.3.4. Pendidikan.....	42
3.1.3.5. Gaji.....	42
3.2. Populasi dan Sampel	42
3.3. Jenis dan Sumber Data	43
3.4. Metode Analisis Data	44
3.4.1. Analisis Data Deskriptif	44
3.4.2. Uji Asumsi Klasik	44
3.4.2.1. Uji Multikolinieritas	44
3.4.2.2. Uji Autokorelasi	46
3.4.2.3. Uji Heteroskedastisitas	47
3.4.2.4. Uji Normalitas	48
3.4.3. Analisis Regresi Linier Berganda	50
3.4.3.1. Pengaruh Temuan Auditor Pemerintah terhadap	

Tingkat Korupsi.....	51
3.4.3.2. Pengaruh Tindak Lanjut sesuai Rekomendasi terhadap Tingkat Korupsi.....	51
3.4.4. Goodness of Fit.....	53
3.4.4.1 Koefisien Determinasi (R^2)	53
3.4.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	53
3.4.4.3 Uji Statistik t.....	54
BAB IV HASIL DAN ANALISIS DATA.....	56
4.1. Deskripsi Objek Penelitian	56
4.2. Analisis Data Kuantitatif.....	57
4.2.1. Statistik Deskriptif	57
4.2.2. Hasil Uji Asumsi Klasik	61
4.2.2.1. Uji Multikolinieritas	62
4.2.2.2. Uji Autokorelasi	68
4.2.2.3. Uji Heteroskedastisitas	72
4.2.2.4. Uji Normalitas	77
4.2.3. Hasil Uji Hipotesis	86
4.2.3.1. Koefisien Determinasi.....	86

4.2.3.2. Hasil Uji Statistik F.....	87
4.2.3.3. Hasil Uji Statistik t.....	90
4.3. Interpretasi Hasil	93
4.3.1. Temuan Auditor Pemerintah tidak berpengaruh Signifikan terhadap Tingkat Korupsi.....	93
4.3.2. Perbaikan yang Dilakukan Auditee setelah Dilakukan Audit memiliki Pengaruh Positif terhadap Tingkat Korupsi.....	94
4.3.3. Penjelasan Variabel Kontrol.....	95
4.3.3.1. Pertumbuhan Ekonomi.....	95
4.3.3.2. Keterbukaan.....	96
4.3.3.3. Ukuran Pemerintah.....	96
4.3.3.4. Pendidikan.....	97
4.3.3.5. Gaji.....	97
BAB V PENUTUP	99
5.1. Kesimpulan Penelitian.....	99
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	101
5.3 Saran bagi Penelitian Mendatang.....	101

DAFTAR PUSTAKA103

LAMPIRAN.....109

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 4.1. Distribusi Frekuensi Penelitian.....	57
Tabel 4.2. Statistik Deskriptif.....	58
Tabel 4.3. <i>Variance Influence Factor</i> Hipotesis 1.....	62
Tabel 4.4. Korelasi Koefisien Hipotesis 1.....	63
Tabel 4.5. <i>Eigenvalue</i> dan <i>Condition Index</i> Hipotesis 1.....	64
Tabel 4.6. <i>Variance Influence Factor</i> Hipotesis 2.....	65
Tabel 4.7. Koefisien Korelasi Hipotesis 2.....	66
Tabel 4.8. <i>Eigenvalue</i> dan <i>Condition Index</i> Hipotesis 2.....	67
Tabel 4.9. Hasil Uji <i>Durbin-Watson</i> Hipotesis 1.....	68
Tabel 4.10. Hasil Uji Statistik Q: <i>Box-Pierce</i> dan <i>Ljung Box</i> Hipotesis 1.....	69
Tabel 4.11. Hasil Uji <i>Durbin-Watson</i> Hipotesis 2.....	70
Tabel 4.12. Hasil Uji Statistik Q: <i>Box-Pierce</i> dan <i>Ljung Box</i> Hipotesis 2.....	71
Tabel 4.13. Hasil Uji <i>Glejser</i> Hipotesis 1.....	74

Tabel 4.14. Hasil Uji <i>Glejser</i> Hipotesis 2.....	76
Tabel 4.15. <i>Skewness</i> dan <i>Kurtosis</i> Hipotesis 1.....	80
Tabel 4.16. Hasil Uji <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov</i> Hipotesis 1.....	81
Tabel 4.17. <i>Skewness</i> dan <i>Kurtosis</i> Hipotesis 2.....	84
Tabel 4.18. Hasil Uji <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov</i> Hipotesis 2.....	85
Tabel 4.19. Koefisien Determinasi Hipotesis 1.....	86
Tabel 4.20. Koefisien Determinasi Hipotesis 2.....	87
Tabel 4.21. Hasil Uji Statistik F Hipotesis 1.....	88
Tabel 4.22. Hasil Uji Statistik F Hipotesis 2.....	89
Tabel 4.23. Hasil Uji Statistik t Hipotesis 1.....	90
Tabel 4.24. Hasil Uji Statistik t Hipotesis 2.....	92

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Indeks Persepsi Korupsi.....	4
Gambar 2.1. <i>Fraud Tree</i>	20
Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran.....	29
Gambar 4.1. Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Scatterplot Hipotesis 1.....	72
Gambar 4.2. Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Scatterplot Hipotesis 2.....	75

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 4.1. Hasil Uji Normalitas dengan <i>Histogram</i> Hipotesis 1.....	78
Grafik 4.2. Hasil Uji Normalitas dengan <i>P-plot</i> Hipotesis 1.....	79
Grafik 4.3. Hasil Uji Normalitas dengan <i>Histogram</i> Hipotesis 2.....	82
Grafik 4.4. Hasil Uji Normalitas dengan <i>P-plot</i> Hipotesis 2.....	83

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN A	Data Objek Penelitian.....109
LAMPIRAN B	Data Tabulasi.....112
LAMPIRAN C	Hasil Output SPSS Hipotesis 1.....118
LAMPIRAN D	Hasil Output SPSS Hipotesis 2.....125

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi di Indonesia yang terjadi di tahun 1997 mengakibatkan perubahan total pada sistem birokrasi pemerintah. Adanya perubahan pada sistem birokrasi pemerintah membawa Indonesia pada masa reformasi. Khan dalam Utomo (2011: 59) mengemukakan bahwa reformasi merupakan perubahan pokok dalam suatu sistem birokrasi yang bertujuan mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan maupun kebiasaan yang lama. Perubahan dalam sistem pemerintahan perlu dilakukan dalam era globalisasi. Globalisasi menuntut adanya penyesuaian pemikiran dan aktivitas yang strategis supaya pemerintahan berjalan dengan efektif dan efisien.

Salah satu perubahan nyata di Indonesia sejak era reformasi adalah munculnya desentralisasi. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonomi untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Maddick dalam Rondinelli (1983 :10) mengartikan desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan secara hukum untuk dapat menangani bidang-bidang atau fungsi-fungsi tertentu kepada daerah otonom. Rondinelli (1983 :13)

mengemukakan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan perencanaan, pembuatan keputusan, ataupun kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada suatu organisasi wilayah, satuan administratif daerah, organisasi semi otonom, pemerintah daerah, ataupun organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat.

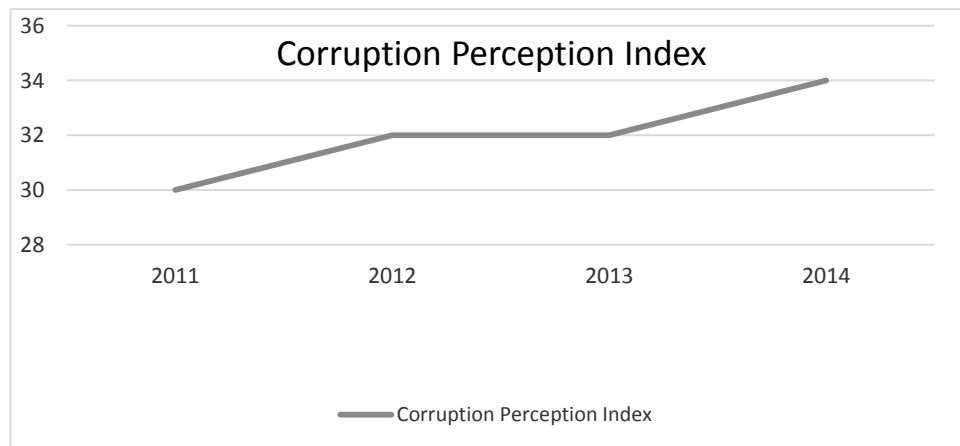
Pada era reformasi Indonesia menerapkan sistem demokrasi. Salah satu strategi supaya tujuan demokrasi dapat tercapai adalah adanya penerapan desentralisasi. Desentralisasi lahir untuk membongkar sentralisasi kekuasaan terutama dalam hal tata relasi pusat dan daerah. Kekuasaan yang terlalu besar akan berakibat terhadap semakin kompleksnya tata kelola pemerintahan. Hal tersebut juga dapat berdampak terhadap penyalahgunaan kekuasaan (Saputra, 2012 :492). Adanya desentralisasi di Indonesia membuat pemerintah daerah dapat mengambil keputusan untuk keberlangsungan rumah tangga daerahnya. Pengambilan keputusan ini mengacu kepada pengembalian kedaulatan rakyat untuk mengelola pemerintahan yang baik dari tingkat atas (pusat) sampai tingkat bawah (daerah). Melalui desentralisasi diharapkan kesejahteraan rakyat meningkat seiring dengan meningkatnya pelayanan publik. Dengan adanya desentralisasi juga diharapkan setiap daerah di Indonesia mampu meningkatkan kompetisi dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keistimewaan, keadilan, demokrasi dan kekhususan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akan tetapi dengan diterapkannya desentralisasi, penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi, suap, dan penyelewengan juga mengalami peningkatan (Liu dan Lin, 2012 :164). Makna desentralisasi telah tercoreng oleh banyaknya kasus korupsi

yang justru dilakukan aparatur daerah mulai dari gubernur, bupati, walikota, anggota DPRD hingga pejabat dinas. Kasus korupsi atas anggaran daerah menunjukkan bahwa penyelenggara daerah belum dapat berkomitmen untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya (Maulani, 2010). Implementasi desentralisasi justru membuat tingkat korupsi di daerah cenderung mengalami peningkatan tajam. Kemampuan kepala daerah dalam mempertahankan posisinya tidak jarang dipengaruhi oleh bagaimana kepala daerah tersebut dapat 'bekerjasama' dengan DPRD. Hal tersebut disebabkan karena DPRD memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan kepala daerah sehingga tidak jarang praktek *money politic* banyak terjadi di gedung dewan (Rinaldi et al, 2007: 15).

Undang-undang nomor 31 tahun 1999 menyatakan bahwa:

“Korupsi merupakan kegiatan yang melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri maupun orang lain, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Gambar 1.1**Indeks Persepsi Korupsi**

Sumber: *Transparency International*

Tingkat korupsi di Indonesia sendiri menurut survey yang dilakukan oleh Transparency International menunjukkan bahwa skor indeks korupsi Indonesia pada tahun 2011 hingga 2014 mengalami kenaikan. Akan tetapi kenaikan yang diperoleh tidak sebanding dengan peringkat korupsi Indonesia di tingkat Internasional dimana pada tahun 2012 peringkat Indonesia turun ke peringkat 108 dari peringkat 100 pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 peringkat Indonesia turun kembali pada peringkat 117, dan pada tahun 2014 Indonesia mengalami kenaikan peringkat menjadi peringkat 107.

Naik turunnya peringkat korupsi Indonesia mengindikasikan bahwa perlu dilaksanakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan daerah. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang pengelolaan keuangan negara menyatakan bahwa penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak

dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan menyatakan bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan oleh suatu badan pemeriksaan (BPK) yang bebas dan mandiri (Kawedar et al, 2011: 33). Undang-undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan juga menyatakan bahwa keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintah dan mempunyai manfaat penting guna mewujudkan tujuan negara demi tercapainya masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara memerlukan suatu lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pemeriksaan keuangan negara dilakukan oleh auditor. Jika korupsi merupakan “*viruse*” yang menyebabkan ketidakstabilan dan membahayakan perekonomian negara, maka auditor merupakan “*immune*” yang mengendalikan ketidakstabilan tersebut dan menghindarkan perekonomian negara dari bahaya korupsi. Dalam lembaga pemerintahan auditor berfungsi untuk mengendalikan sistem yang ada. Pengendalian sistem tersebut dilakukan dengan melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap aset-aset pemerintah. Auditor mempunyai peranan yang unik di

berbagai negara dalam mengendalikan kasus korupsi. Seperti dikutip dari penelitian yang dilakukan oleh Liu dan Lin (2012: 164) yaitu:

“Government auditing, the fundamental purpose of which is to monitor, ensure and appraise the accountability of government, is an important institutional arrangement in modern government governance. By monitoring the operation of public power, especially how public resources are used, government auditing can strengthen accountability and reduce the abuse of power and resources.”

Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa audit pemerintahan berfungsi untuk memonitor, mengukur, dan menilai akuntabilitas dari pemerintah. Dengan memonitor pekerjaan pemerintah terutama efektivitas pemanfaatan sumber daya maka audit pemerintah diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi penyalahgunaan kekuasaan.

Auditor juga harus memastikan transparansi dalam laporan keuangan yang diaudit. Memberikan informasi keuangan secara transparan merupakan cara yang tepat dalam mencegah korupsi dan memantau kegiatan pemerintahan. Studi ini akan mengeksplorasi mengenai hasil pemeriksaan berkualitas yang dilakukan oleh BPK. Hasil pemeriksaan yang berkualitas merupakan pemeriksaan yang dapat mengindikasikan terjadinya penyimpangan. Melalui hasil pemeriksaan BPK penulis akan menghubungkan keterkaitan antara kualitas hasil pemeriksaan auditor dengan tingkat korupsi di Indonesia. Lebih lanjut lagi penulis akan menelusuri keterkaitan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang diaudit setelah dilakukan audit oleh BPK.

Laporan hasil pemeriksaan yang dihasilkan oleh auditor pemerintah akan lebih berguna apabila rekomendasi yang diberikan oleh auditor atas temuan dapat

mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini dapat terjadi apabila pemerintah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan rekomendasi yang diberikan auditor. Dengan tindak lanjut tersebut laporan keuangan pemerintah dapat lebih berkualitas dan mencerminkan pengelolaan pemerintah yang baik (Sari, 2013: 1012). Dengan adanya tindak lanjut perbaikan terhadap temuan auditor diharapkan tingkat korupsi di suatu daerah dapat menurun.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Liu dan Lin (2012). Dengan menggunakan tingkat korupsi sebagai variabel dependen serta temuan auditor dan tindak lanjut auditor sebagai variabel independen Liu dan Lin menyimpulkan terdapat pengaruh positif antara temuan audit dengan tingkat korupsi dan terdapat pengaruh negatif antara tindak lanjut audit dengan tingkat korupsi. Penelitian serupa di Indonesia juga dilakukan oleh Abror (2014). Dengan menggunakan variabel dependen dan variabel independen yang sama dengan penelitian Liu dan Lin (2012), penelitian tersebut menemukan bahwa terdapat pengaruh negatif antara temuan auditor dengan tingkat korupsi dan terdapat pengaruh positif antara tindak lanjut audit dengan tingkat korupsi.

Mengacu pada penelitian Abror (2014) terdapat keterbatasan penelitian, yaitu tidak dimasukkannya faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat korupsi. Untuk itu pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel pertumbuhan ekonomi, keterbukaan, ukuran pemerintah, pendidikan, dan gaji sebagai variabel kontrol untuk mengetahui pengaruhnya terhadap tingkat korupsi.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa desentralisasi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menurut Oates dalam Sasana (2009: 106) desentralisasi fiskal di negara berkembang apabila tidak berpegang terhadap teori desentralisasi akan berdampak terhadap meruginya pertumbuhan ekonomi dan efisiensi. Hal tersebut juga akan berdampak terhadap meningkatnya korupsi di suatu wilayah.

Keterbukaan pemerintah sangat diperlukan dalam era modern ini. Zhou dan Tou dalam Liu dan Lin (2012: 171) mengungkapkan bahwa adanya transparansi di pemerintahan akan menurunkan tingkat korupsi di wilayah tersebut. Penelitian tersebut mengukur keterbukaan pemerintah dengan jumlah ekspor dan impor dan menemukan bahwa daerah dengan ekspor dan impor yang tinggi akan memiliki tingkat korupsi yang rendah. Gatti (2004: 855) mengukur keterbukaan sebagai hambatan perdagangan dan arus kas internasional yang mungkin disebabkan oleh tindakan kolusi antara individu dengan pejabat.

Ukuran pemerintah yang besar akan mendapat transfer kekayaan yang besar pula. Terdapat kontroversi mengenai bagaimana pengaruh ukuran pemerintah terhadap tingkat korupsi. Ali dan Ise (2003) menemukan bahwa ukuran pemerintah yang besar akan berdampak terhadap tingginya tingkat korupsi. Sedangkan Fisman dan Gatti (2002) menemukan bahwa ukuran pemerintah yang besar akan berdampak terhadap rendahnya tingkat korupsi.

Pendidikan merupakan landasan utama pembentukan karakter seseorang. Adanya pendidikan formal akan menguntungkan negara dalam memberantas korupsi. Hal ini disebabkan karena pertama, lembaga pendidikan formal merupakan

lembaga yang stabil. Kedua, tidak menambah budget pemerintah besar-besaran. Ketiga, dapat dilaksanakan secara sistematis dan berkepanjangan (Montessori, 2012: 294). Glaeser dan Saks (2006) menemukan bahwa tingginya tingkat pendidikan di suatu daerah berdampak terhadap rendahnya tingkat korupsi di wilayah tersebut.

Gaji merupakan imbal hasil atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh seseorang. Kebijakan upah yang tinggi dikaitkan dengan rendahnya korupsi sehingga banyak negara yang mengadopsi kebijakan upah yang tinggi untuk menghindari kemungkinan terjadinya korupsi (Liu dan Lin, 2012).

Penulis tertarik mengangkat topik ini karena penelitian mengenai hubungan audit pemerintah dan tingkat korupsi masih tergolong jarang dilakukan. *“Only a few studies touch upon the relationship between government auditing and corruption.”* Penelitian mengenai korupsi kebanyakan berfokus pada penyyuapan di bidang ekonomi dan perbankan sedangkan perhatian pada keuangan publik masih jarang dilakukan. (Liu dan Lin, 2012; Blume dan Voight, 2011; Olken, 2007).

BPK RI memiliki perwakilan di setiap provinsi dan berpusat di ibukota. Oleh karena itu BPK juga dapat berperan dalam menemukan penyimpangan dan memberikan rekomendasi perbaikan di setiap provinsi perwakilan (UUD 1945 pasal 23G). Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga menyatakan bahwa penuntutan dan kewenangan lain diselenggarakan oleh Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di provinsi. Melalui kasus korupsi yang dihimpun di setiap provinsi, peneliti meneliti peran auditor pemerintah dalam memberantas korupsi dalam 2 sudut pandang yaitu temuan

penyimpangan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Lebih lanjut lagi peneliti akan menggunakan pertumbuhan ekonomi, keterbukaan, ukuran pemerintah, pendidikan, dan gaji sebagai variabel kontrol untuk mengetahui pengaruhnya terhadap tingkat korupsi.

Berdasarkan pembahasan tersebut maka penelitian ini mengambil judul:

“ANALISIS PENGARUH AUDITOR PEMERINTAH TERHADAP TINGKAT KORUPSI DI INDONESIA”.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan pertanyaan yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

- 1.2.1 Apakah jumlah temuan audit memiliki korelasi terhadap tingkat korupsi di Indonesia?
- 1.2.2 Apakah perbaikan yang dilakukan oleh auditee setelah dilakukan audit memiliki korelasi terhadap efektivitas tingkat pengendalian korupsi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1.3.1 Menguji apakah terdapat korelasi antara jumlah temuan audit terhadap tingkat korupsi di Indonesia.

1.3.2 Menguji apakah terdapat korelasi antara perbaikan yang dilakukan oleh auditee setelah dilakukan audit terhadap efektivitas tingkat pengendalian korupsi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat bagi Akademis

Dalam bidang akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai pengaruh auditor pemerintah terhadap tingkat korupsi di Indonesia dan mampu menjadi acuan bagi penelitian berikutnya khususnya penelitian yang berfokus terhadap auditor pemerintah dan tingkat korupsi.

1.4.2 Manfaat bagi Penulis

Bagi penulis penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan mengenai peran auditor pemerintah dalam mengendalikan tingkat korupsi di Indonesia.

1.4.3 Manfaat bagi Auditor

Bagi auditor penelitian ini berguna sebagai acuan dalam melaksanakan kode etiknya sebagai auditor.

1.5 Sistematika Penulisan

1.5.1 Bab 1 : Pendahuluan

Pendahuluan berisi latar belakang masalah yang menjadi dasar dari penelitian ini, rumusan masalah, dan tujuan penelitian.

1.5.2 Bab 2 : Telaah Pustaka

Telaah pustaka membahas mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

1.5.3 Bab 3 : Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian membahas mengenai variabel penelitian yang terdiri dari variabel independen dan variabel dependen serta definisi operasionalnya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode analisis yang digunakan, dan pengujian hipotesis.

1.5.4 Bab 4 : Hasil Analisis

Hasil analisis membahas mengenai hasil dari analisis penelitian melalui pengujian hipotesis.

1.5.5 Bab 5 : Penutup

Penutup membahas mengenai kesimpulan dari penelitian dan saran mengenai penelitian yang akan datang.